

**PEMIKIRAN POSMODERNISME DAN PANDANGANNYA TERHADAP
PENDIDIKAN
(Studi Kritis Atas Kurikulum Pendidikan Tinggi Indonesia)**

M. Fajru Sidqi¹ dan Inayatul Ulya²

Program Studi Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pekalongan
Email : Fajrusidqi7@gmail.com

ABSTRACT

Non schlae set vittae discinnus, this is a latin idiomatic to clear the purpose of educational purposes; we learn for not for school but for life. This article is inspired by phenomena of modernity, all have pragmatics orientation and erode the essence and value of education. Indonesia clear that claim, all system in education is structurized by certain portion in relation with jobfield, outline of modernity creates new world order in false-structure and lead by developed nation. They now drive the direction of education, what should be done by higher education to their curriculum, and fullfilling industrial need is a must as priority in curriculum sector. Posmodernity – perspective tries to pass the standart of modernity by making way out for science ideality, these are never ended process to revitalize new concept in developing curriculum in Higher education. Deconstruction is one key theory to offer some solution in managing curriculum, then library research is used to analyze by comparing ideal world by expert as their opinion to real situation in Indonesian education especially on curriculum concept.

Keywords; Curriculum, Modernity, Post-modernity

PENDAHULUAN

Indonesia meletakkan landasan formal pendidikannya pada dokumen konstitusi sebagai patokan hukum dimana institusi pemerintah menegaskan peran penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Peran negara ini penting untuk menetapkan standar manusianya dalam menghadapi persaingan global. Rakyat sendiri sebagai sumberdaya manusia sangat penting sebagai bentuk keberlangsungan bangsa; trend global sendiri sebenarnya telah mengarahkan negara dalam format

persaingan industri. Jebakan industri ini turut membawa dampak yang signifikan didunia pendidikan. Ivan Illich mengeksplorasi gagasannya dalam *deschooling society* (1971) dengan tesisnya bahwa mitos – mitos sosial yang tumbuh di lembaga – lembaga masyarakat era industri, sekolah salah satunya; telah menjadi mekanistik, anonim, masal, dan yang lebih parah lagi memperkurus kemanusiaan atau dehumanisasi dalam istilah freire.

Jika dikaitkan antara pendidikan di Indonesia khususnya pada pendidikan tinggi, maka unsur mekanistiknya lebih terasa karena merujuk pada sistem pendidikan yang lebih maju dan berbasis masyarakat industrialis. Negara barat khususnya

Amerika menjadi rujukan dalam mengembangkan pengetahuannya (Toffler,1971:23), kekuatan Amerika sebagai negara adidaya dipatahkan dominasinya oleh kesadaran-kesadaran komunitas yang berakar dari paham komunitarian di Eropa yang membentuk masyarakat Uni Eropa. Entitas geopolitik eropa sendiri salah satunya memunculkan kesadaran kesejahteraan bersama tiap negara, tidak boleh ada negara yang tertinggal. Sistem industrialisasi dan masyarakat kapitalis yang timbul di kedua kawasan tersebut berdampak pada sistem pendidikannya dalam rangka pemenuhan sumberdaya manusia, antara industrialisasi dan pengetahuan sebenarnya mengandung hubungan yang komplementer satu sama lain. Industri membutuhkan produktivitas hasil dan efisiensi proses, sementara pengetahuan memberikan solusi atas kebutuhan industri melalui penemuan. Era modernisasi tersebut hanya mementingkan kesejahteraan, dan rasionalitas pengetahuan yang mencirikan pada pendewaan rasionalitas dan sangat antroposentris (Habermas; 1989:24). Kepentingan kesejahteraan hanya dapat dicapai dengan pengetahuan yang maju dan membantu proses produksi dimana setiap negara memiliki kepentingan untuk memajukan sistem pendidikannya.

Pendidikan tinggi sebagai salah satu sub-sistem pendidikan nasional menjalankan peran mencerdaskan kehidupan bangsa. Regulasi penyelenggaraan pendidikan telah tersedia dengan kerangka kualifikasi yang mempersyaratkan kemampuan tertentu pada setiap tingkatannya; Peraturan Presiden Nomor 8 tahun

2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI mengatur baku bidang pendidikan, bidang latihan kerja, dan pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor. Secara umum pada KKNI berisi tentang penguasaan pengetahuan, ketrampilan kerja, dan ketrampilan manajerial; ketiga komponen itu diturunkan ke capaian pembelajaran yang terdiri dari sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus untuk ditransformasikan ke kurikulum program studi. Sebenarnya relasi dunia kerja dengan dunia pendidikan sangat erat di era modern maupun posmodern dengan mengedepankan rasionalitas nyata dan unsur transendental, akan tetapi tetap saja di era posmodern ada pengekanan idealisme intelektual. Dalam teorema *darwinian evolution* memandang bahwa pembelajaran harus dilaksanakan secara pragmatis dan pendapat ini diadopsi oleh John Dewey yang menyatakan bahwa pendidikan adalah proses pengalaman dan aktivitas sosial; maka proses pendidikan harus selaras dengan realitas lingkungan dan perolehan pengetahuannya tidak harus di institusi pendidikan. Pandangan naturalistik ini dekat dengan posmosentris yang memiliki orientasi kultural, historis, politik, ekologi, estetika, teologi serta berhubungan dengan kondisi kemanusiaan, struktur sosial, dan *ecosphere* (Slattery; 2005:192). Komprehensifitas posmodern ini patut diadopsi kurikulum pendidikan tinggi, dimana trend persaingan kerja lebih memperhatikan kemampuan natural,

bakat, dan keahlian. Pragmatisme era modern sangat kentara terlihat dalam kurikulum pendidikan tinggi melalui profil lulusan, peran asosiasi, hingga baku standar yang ditetapkan pemerintah. Sejatinya pendidikan adalah proses berpikir kreatif yang tidak hanya satu tujuan saja, hal ini dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang tidak berorientasi dari satu ujud core competence saja melainkan secara natural mengarahkan dirinya secara empirisitas dan kemanfaatan. Penerapan kurikulum KKNi dianggap membelenggu lulusan pendidikan tinggi dalam kerangka-kerangka yang memasung kompetensi prosedural; yakni kompetensi yang harus dipenuhi dalam jenjang pendidikan tertentu. Secara langsung sebenarnya mematikan proses kreatif dari intelektualitas manusia sehingga ijazahnya yang menentukan kompetensi seseorang, dan bukan kemampuan riilnya. Paradoks lain yang ada dalam KKNi adalah pengakuan lintas kerangka dan sektor, orang yang tidak menempuh pendidikan tinggi tapi memiliki kemampuan yang tinggi dapat diakui oleh proses rekognisi dan dijebak lagi bahwa orang tersebut telah masuk dalam level kerangka tertentu tergantung pengakuan.

PERMASALAHAN

Latar belakang diatas secara gamblang menegaskan ketidakkonsistenan KKNi terhadap ruang, dan waktu. Rasionalitas KKNi yang disusun berdasarkan kebutuhan lulusan tertolak dengan adanya paradoks didalamnya; lulusan yang memasuki dunia kerja pun kemudian dipasung lagi dengan berbagai

macam pelatihan, kursus yang menganggap proses pendidikan yang berjalan di pendidikan tinggi tidak adaptif. Lebih lanjut lagi dengan kondisi kemapanan negara barat dan timur yang tidak berimbang, disatu sisi negara barat sudah melaju kemasyarakatan ekonomi industri 4.0; Indonesia masih menyiapkan infrastruktur SDM melalui program revitalisasi pendidikan tanpa diimbangi dengan infrastruktur industri yang memadai. Paradoks ini menimbulkan ketidakseimbangan idealitas dan realitas,

TEORI DAN METODOLOGI

1. Tujuan Kurikulum Pendidikan

Doherty dan Peters menegaskan pandangan bahwa kurikulum bukan hanya dokumen rancangan pendidikan saja, tetapi yang lebih penting mencakup implementasi rancangan kurikulum, pelaksanaan, hingga luaran proses pendidikannya yang jelas. Schubert (1986: 190) mengidentifikasi empat orientasi tujuan kurikulum; 1) global, 2) behavioral, 3) evolving, 4) expressive. Tujuan pertama adalah orientasi global yang diartikan sebagai kebahagiaan manusia. Pendidikan adalah proses bertransformasi menuju arah lebih baik yaitu kehidupan yang berbudaya (*virtuous life*), dalam konteks ini Herbert Spencer (1861) menyatakan tujuan kehidupan global komprehensif yakni bertahan hidup, memenuhi kebutuhan hidup, membersarkan anak, hubungan sosial dan politik, gratifikasi rasa dan perasaan.

Tujuan kedua adalah orientasi behavioral yang berakar dari sistem magang untuk menguasai suatu tugas

agar lebih terampil didunia kerja. Frank Bobbit (1916) adalah orang pertama yang membawa sistem ini ke kurikulum dan pembelajaran, melalui latihan yang terperinci peserta didik dapat menginternalisasi sikap kerja dan spirit ekonomi dengan baik, hal ini dikenal sebagai tujuan tingkah laku atau *behavioral objectives*. Tujuan ketiga adalah tujuan yang berkembang atau *evolving purposes*; tujuan ini didapatkan bukan dari proses pendidikan langsung dari sebuah sistem pendidikan melainkan dari penempatan pengalaman yang diabstraksikan peserta didik yang berkorelasi dengan kurikulum pendidikan melalui proses asosiasi atau penalaran. Tujuan keempat yaitu tujuan yang tidak terencana atau *expressive goals*, tujuan ini seringkali dilakukan untuk melenturkan kurikulum dengan kondisi terkini sekaligus yang berorientasi masa depan. Kemunculan tujuan ekspresif ini didapat pengelola pendidikan melalui serap informasi berdasar perkembangan dan dinamika jaman kemudian ditransformasikan kedalam kurikulum.

2. Kurikulum Pendidikan Tinggi

Bidang studi kurikulum merupakan pendatang baru dalam masyarakat formal inkuiri akademik, tetapi karena bidang studi ini menyangkut upaya pemenuhan hajat hidup orang banyak menjadi tidak mengherankan jika kurikulum menjadi suatu bidang studi yang penting untuk dikaji dan dikembangkan terus (Schubert, 1988: 54). Kurikulum pendidikan tinggi menjadi salah satu domain dalam sistem pendidikan nasional, dalam sistem pendidikan terjadi proses

transformasi, yaitu proses mengubah *raw input* (anak didik) agar menjadi manusia terdidik sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun output atau hasilnya adalah manusia terdidik yang diperuntukkan bagi masyarakat atau sistem – sistem lain yang berada dalam suprasistem. Pendidikan tinggi sebagaimana disebut dalam Undang – undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan setidaknya ada azas – azas yang harus dipenuhi yakni kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggungjawab, kebhinekaan, dan keterjangkauan. Azas tersebut menjadi bagian dalam pengelolaan implementasi kurikulum pendidikan tinggi agar tepat sasaran dan bernilai.

Kurikulum pendidikan tinggi sendiri bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dalam menyusun kurikulum terlebih dulu menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan kompetensinya. Dengan adanya KKNI rumusan kemampuan dinyatakan dalam istilah capaian pembelajaran atau *learning outcomes*. Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam KKNI, tetapi karena didunia kerja penggunaan istilah kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang sifatnya lebih terbatas, terutama yang terkait dengan uji kompetensi dan sertifikat kompetensi. Inti dari kurikulum KKNI sendiri menitik beratkan pada taksonomi sikap, ketrampilan umum, pengetahuan dan ketrampilan khusus. Permenristekdikti Nomor 44 tahun

2015 menentukan jika sikap dan ketrampilan umum ditentukan oleh pemerintah sebagai standar minimal, dan pengetahuan serta ketrampilan khusus ditentukan oleh asosiasi program studi sejenis.

3. Metodologi Posmodernisme dalam Pendidikan

Tokoh yang dianggap meletakkan dasar-dasar filsafat posmodern di dunia pendidikan adalah William Pinar dan Patrick Slattery (2006), tema – tema tentang pluralitas, heterogenitas, dan deferensiasi ditonjolkan agar tidak terjadi monopoli kebenaran. Slattery dalam bukunya *Curriculum in Post-Modern Era* (2006: 23) menyampaikan bahwa perencanaan kurikulum secara makro hingga mikro tidak melulu berisi tujuan pembelajaran, proses, penilaian, dan luaran. Bahkan lebih dari itu, dia menyampaikan jika tujuan tidak tunggal, dan siswa pun diberikan kebebasan untuk menetapkan tujuannya, memilih materinya hingga mengukur capaiannya sendiri. Posmodernisme yang menggunakan tema tersebut merupakan bukti betapa pendidikan tidak tunggal dimainkan perannya oleh institusi pendidikan, prosesnya harus disebarkan melalui kerja – kerja yang tidak hanya dibebankan pada sekolah. Apalagi banyak realitas yang menunjukkan betapa perguruan tinggi justru sering memainkan peran dogmatis dan dominannya melalui transformasi nilai serta transformasi pengetahuan.

Selama ini, pendidikan seolah hanya diarahkan pada pembentukan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga beban berat pengajaran seringkali diarahkan pada

penguasaan bidang tersebut. Posmodernisme bergerak untuk menghilangkan penyakit manusia modern, yakni; degradasi, krisis moral, krisis sosial sebagai imbas dari dominasi iptek, dan penerapan rasio yang menempatkan manusia sebagai alat ukur kebenaran atau berperan sebagai *homo-mensura* atau *Man is the measure of all things*. Keseluruhan kritik posmodernisme secara tak beraturan menyerang struktur bangunan modernisme, skeptisitas gejala modernisme ini diawali oleh Friedrich Nietzsche; dalam *German Ideology*, Nietzsche menyerang gagasan modernisme yang mematikan roh intuisi kebaikan dengan mempertuhankan rasio dan aspek *utile* dari produk yang dihasilkannya. Krisis yang menimpa masyarakat Eropa waktu itu menggiring kepada gejala nihilisme kebudayaan (Nietzsche, 2002:23). Sikap kritis yang semula hanya ada pada tema arsitektur dan seni, kini merambah ke tema-tema sosial, humaniora dan sebagainya. Termasuk beberapa aliran pendidikan seperti pedagogi kritis atau *critical pedagogy* yang dipegang teguh oleh Freire dan Ivan Illich. Kemapanan dunia modernisme di bidang pendidikan juga di dobrak oleh William Pinar (2005) sebagai penganut humanisme radikal yang berusaha menempatkan pendidikan sebagai proses alamiah. Sistem pendidikan dalam konsep era posmodern pun ditawarkan dengan menempatkan manusia, alam dan teknologi secara berimbang atau *human-eco-techno balance*.

Trend Posmodernisme versus modernisme dapat diilustrasikan sebagai pertentangan yang membentuk pola binary opposition

atau oposisi biner saling berhadapan dan berkonfrontasi secara ide. Jacques Derride sebagai peletak dasar dekonstruksionisme menjadi

rujukan alur dan alir pemikiran posmodernisme dalam pendidikan juga.

Gambar 1. Oposisi Biner

Modernisme	Posmodernisme
• Sentralisasi • Pertarungan kelas • Kultur • Industri • Legitimasi • Konsensus	• Desentralisasi • Pertarungan etnis • Sub-kultur • Pasca Industri • Delegitimasi • Dekonsensus

Relevansi simulasi dari oposisi biner diatas menunjukkan adanya pertentangan yang jelas dan layak digunakan untuk menganalisis landasan, asas, dan tujuan kurikulum yang berlaku di pendidikan tinggi. Penjelasan oposisi biner dikaji secara analitis melalui metode studi pustaka dengan saling mengkorelasikan pustaka – pustaka yang relevan.

PEMBAHASAN

Alur pembahasan dalam studi literatur kritis kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia mendasarkan pada perbandingan antara modernisme dan posmodernisme dalam dilema pendidikan. Kerangka analisisnya menempatkan oposisi biner sebagai penyifatan fenomena yang diambil dari bingkai modernisme dan posmodernisme.

1. Sentralisasi vs Desentralisasi KPT KKN

Pemerintah memutuskan bahwa kurikulum yang dianut di Indonesia adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan, artinya

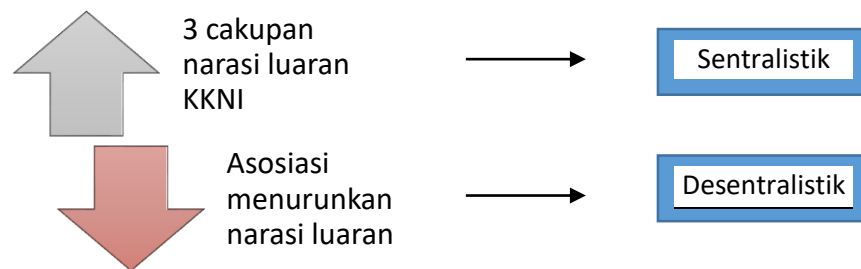
tiap satuan pendidikan memiliki otoritas dalam menentukan muatan kurikulumnya berdasarkan karakteristik, kebutuhan dan jangkauan masa depan. Dalam perspektif posmo, Lyotard menolak adanya ide metanarasi, isu kebenaran tunggal dan universal; yang diakui adalah kebenaran – kebenaran dan legitimasi menjadi majemuk. Isu sentralisasi dalam pengelolaan kurikulum pendidikan tinggi berada pada kebijakan kerangka kualifikasi yang berjumlah delapan level pengakuan untuk didistribusikan dalam muatan kurikulum. Sentralitas ini bertujuan mengakomodir narasi luaran KKN pada kemampuan bidang kerja, pengetahuan yang dimiliki dan kemampuan manajerial sebagai panduan perguruan tinggi dalam menentukan muatan kurikulumnya. Sentralistisnya ketiga unsur utama KKN tersebut menjadi kebenaran universal dan

harus dianut semua pelaksana pendidikan tinggi, dengan demikian maka kemampuan bidang kerja, pengetahuan, dan manajerial menjadi absolut sekaligus mutlak untuk luaran lulusan.

Langkah akomodatif pemerintah untuk menjadikan satu pintu kebijakan kurikulum sebenarnya baik, akan tetapi dengan menyerahkan kepada perguruan tinggi maupun asosiasi

dalam penentuan narasi luaran KKNi artinya tujuan umum pendidikan atau *Goals* memberi arah yang baik dalam penetapan program – program kurikuler baik intra maupun ekstra. Dengan demikian satuan pendidikan tinggi mengonsepsi mata kuliah dan bahan kajian dengan menggunakan narasi yang ditentukan asosiasi.

Gambar 2. Narasi Luaran KKNi



Pola oposisi biner ini menempatkan pemerintah berdiri pada posisi antara ya dan tidak, antara modern dan posmodern; kegamaan ini karena nasib negara juga ditentukan dari trend global tentang pengakuan kualifikasi tertentu, dan ini menegaskan Indonesia untuk berdiri dengan kurikulum yang mandiri. Sebagaimana diketahui jika Indonesia mendasarkan juga dari kerangka kualifikasi yang merujuk ASEAN University Network dan ditransmisikan ke KKNi. Kegamaan kedua, dalam teori posmodern meletakkan kebenaran majemuk dan menolak kebenaran tunggal. Pemerintah memilih jalan tengah dengan memberi jalan pada asosiasi prodi sejenis maupun PT sendiri dalam

menetapkan narasi luaran lulusannya, tetap saja ada penegasian dari perguruan tinggi besar kepada perguruan tinggi medioker. Keangkuhan tersebut muncul dapat dari latar belakang institusi, kiprah, maupun latar belakang sosial pendidikannya. Sedangkan perguruan tinggi lain enggan dan segan dengan narasi yang diajukan PT besar.

2. Industri vs Pasca Industri

Ada *logics* yang hilang ketika pemerintah melalui kemenristekdikti mencanangkan, mensosialisasi, sekaligus memasifikasi revolusi industri 4.0. Sejatinya istilah itu muncul untuk memaksa negara industri maju Eropa untuk meningkatkan produksi dengan berbantu

teknologi robotik ataupun perangkat lainnya, kondisi eksisting industri di Indonesia belum didominasi oleh teknologi robotik sehingga dipandang lebih perlu menyiapkan *soft-human infrastructure* terlebih dulu. Pada tahun 2018 Kemenristekdikti melalui direktorat pembelajaran dan kemahasiswaan mengeluarkan perangkat pembelajaran penunjang KPT KKNI yang menyiapkan pembelajaran *blended learning* sebagai piranti menuju revolusi industri 4.0 dalam bentuk RPS atau rencana pembelajaran semester.

Dampak kebijakan diatas membuat perguruan tinggi menciptakan kurikulum yang berorientasi pada industri, dan latah pada industri 4.0 yang tentunya membutuhkan infrastruktur kampus yang modern, persepsi masyarakat modern memang berorientasi pada industri sehingga mau tidak mau arah pendidikan mengikuti arus zaman. Dari sudut pandang teori *reflexive modernity* Ulrich Beck, agen – agen modernitas barat melakukan paksaan struktural secara bebas dan karenanya semakin mampu menciptakan secara refleksif diri mereka sendiri dan masyarakat sekitarnya. Kondisi tersebut sama dengan masing-masing komunitas menciptakan standar – standar sendiri dalam pergaulan komunalnya, misal Eropa memiliki *framework* atau kerangka keahlian profesional tersendiri, begitupun juga Eropa, bahkan ASEAN, termasuk didalamnya Indonesia yang ikut dalam arus modernitas refleksif di

bidang pendidikan dengan kurikulum KKNI-nya. Secara gamblang terciptanya kerangka-kerangka kualifikasi itu dipastikan berhubungan erat dengan struktur kelas pekerja berdasar klasifikasi keahliannya, sumbangsih industri akan sangat menentukan produk lulusan yang dihasilkan oleh proses pendidikan.

Persepsi modernitas yang sangat dipengaruhi industrialisasi membentuk lulusan yang kaku dan hanya memiliki kebermaknaan tunggal setelah melalui proses pendidikannya. Kebermaknaan tunggal itu yang mengurung imajinasi orang berpendidikan seolah tertekan harus memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan proses pendidikannya. Persepsi itu yang ditolak oleh posmodernisme, Lyotard menolak narasi umum atau persepsi *metanarrative*, teori tersebut memerangi totalitas dengan menghidupkan perbedaan. Bentuk masifikasi revolusi industri 4.0 oleh kemenristekdikti dianggap menjadi narasi umum yang diikuti oleh semua pengelola perguruan tinggi sehingga mau tidak mau diikuti dengan alasan regulasi. Pembeneran regulasi hanya didasarkan pada realitas tunggal, bukan jamak, bahkan lebih parah lagi memperhatikan tatanan masyarakat industri yang tidak semua perguruan tinggi mampu mengadopsinya. Landasan *metanarrative* menjadikan antar perguruan tinggi memiliki hak istimewa terhadap perguruan tinggi lainnya, dan menurunkan derajat sebagian besar yang lainnya, memberi kekuasaan pada kelompok tertentu. Contohnya

perguruan tinggi besar cenderung diberi kekuasaan untuk mengerjakan sektor pekerjaan tertentu karena sudah lebih dulu mapan, ataupun kurikulum dari PTN cenderung dijadikan bahan rujukan karena mereka memiliki perlakuan khusus dari pemerintah mulai dari fasilitas hingga menjadi agen dalam mentransmisikan kebijakan pendidikan di perguruan tinggi lainnya.

3. Legitimasi vs Delegitimasi

Untuk mengatakan kebenaran, maka tidak akan dapat memisahkannya dengan genealogi kekuasaan. Genealogi sendiri menurut Michael Foucault adalah salah satu tipe sejarah sosial yang sangat berbeda, cara pengaitan pandangan historis dengan trajectories yang teratur dan terorganisir yang tidak mengungkapkan asal-usulnya atau tidak selalu realisasi tujuannya. Ini adalah cara menganalisa lintasan-lintasan diskursus, praktik dan peristiwa yang jamak, heterogen dan terbuka, cara pembentukan pola hubungan, tanpa jalan lain ke rezim kebenaran yang mengklaim

hukum pseudo-naturalistik atau keniscayaan global (Dean,1994:35-36).

Kutipan literatur diatas bertujuan membingkai diskursus legitimasi dan delegitimasi dalam pendidikan. Legitimasi merupakan pengakuan yang bersifat struktural antara pemerintah (kekuasaan), perguruan tinggi (pengetahuan), dan dunia kerja (industri) jika tercipta hubungan koordinatif intelektualitas tinggi; dalam hal delegitimasi, Foucault menggambarkan bisa saja terjadi persaingan antara pengetahuan dan kekuasaan sehingga saling mendelegitimasi masing-masing pihak. Dalam perspektif pengembangan kurikulum pendidikan tinggi, kontra legitimasi terjadi apabila salah satu sistem dominasi dalam hal ini pendidikan tinggi bergerak maju lebih cepat tanpa diikuti kekuasaan, akibat yang timbul adalah saling mendelegitimasi antara kekuasaan, dan pengetahuan. Industri akan lebih menerima secara pragmatis dan berusaha mendamaikan relasi kekuasaan dan pengetahuan.

Gambar 3. Relasi struktural



Relasi struktural diatas menjadi analogi dalam penyusunan kurikulum pendidikan tinggi, legitimasi utama berada di pemerintah selaku pemegang

kekuasaan. Sistem kurikulum harus diajarkan dalam kerangka regulasi yang jelas, KKNI yang terdiri dalam 9 level menjadikan *border* antar jenjang lebih jelas

dan tegas; seandainya kurikulum melampaui jenjangnya maka tidak dilihat sebagai keunggulan melainkan tidak diakui dan jika ingin diakui harus melalui rekognisi dan itupun hanya berlaku personal bukan institusional. Paradoksnya sistem ini menjadikan legitimasi dan delegitimasi lebih terlihat dalam sistem kurikulum KKNi. Perspektif posmodern menghendaki sistem terbuka dan persaingan antar kelas yang lebih tajam untuk menghasilkan tenaga terdidik terbaik, bahkan kejamnya delegitimasi terhadap yang tidak secara formal mendapatkan kualifikasi harus tersisih dari persaingan, semuanya diuji dengan administratif formal dan bukan diuji di publik melalui dialektika terbuka.

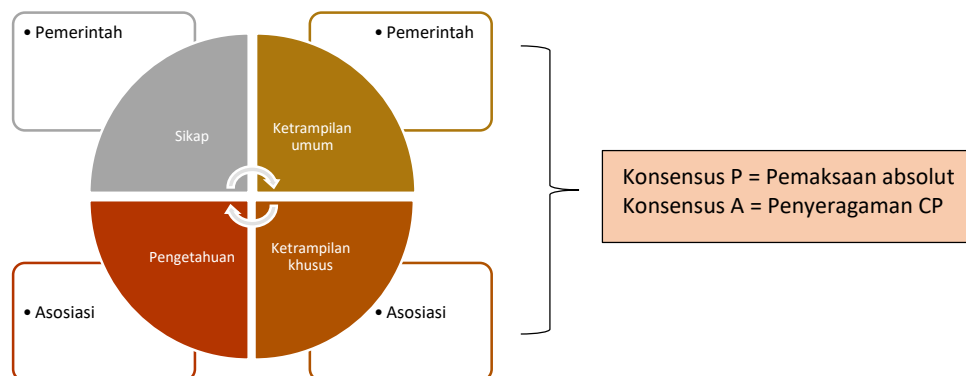
4. Konsensus vs dekonsensus

Bagi yang terbiasa berdialektika dalam perspektif posmodern, KKNi adalah wujud dari sistem pembelajaran yang hipokrit, yakni dengan mewujudkan idealisme tapi dipasung dalam kerangka

kualifikasi, mematerialisasikan realitas tapi membatasi cakupan kedalaman dan keluasan materi pembelajarannya. Persepsi tersebut menimbulkan konsensus dan dekonsensus, konsensus adalah wujud jual beli ide yang berdiri diluar nalar idealitas sehingga terjadi kesepakatan, sementara dekonsensus adalah jual beli ide untuk diadu diatas panggung realitas dan tidak menghendaki kesepakatan.

Analogi diatas muncul untuk mempertegas konsensus yang terjadi dalam kurikulum KKNi adalah pemaksaan tunggal secara struktural bahwa kurikulum harus mengacu pada asosiasi prodi sejenis, dan ini adalah wujud pemaksaan struktur untuk menciptakan konsensus dan tidak terjadi dinamika apapun terhadap lulusan perguruan tinggi. Tidak ada paradesasi kemampuan lulusan yang saling mencolok, hanya mengeluarkan karakteristik-karakteristik tertentu dari *institutional value* saja sebagai atribut pembeda.

Gambar 4. Konsensus dalam KKNi



Konsensus pemerintah adalah memaksakan keseragaman CP seluruh prodi meskipun hanya menyebut sebagai standar minimal, penganut essensialisme memandang mungkin yang dimaksud pemerintah benar karena berusaha mengembalikan norma kultural untuk dipelajari dalam kurikulum positif, meskipun tidak tepat jika sikap dan ketrampilan diajarkan di perguruan tinggi. Sejak jenjang pendidikan dasar harusnya menjadi kurikulum positif, dan baru disadari diakhir-akhir ini saja yang mendasari pembelajaran berbasis tema untuk membentuk karakter. Adanya mis-management memunculkan produk konsensus, sikap dan ketrampilan umum dapat dipelajari dengan manajemen kurikulum baik yang *real* maupun *hidden*.

Konsensus berikutnya yang tercipta adalah penyeragaman capaian pembelajaran, secara hakikat bertujuan menghasilkan kerangka kemampuan antar perguruan tinggi. Pada praktiknya tetap ada saling merujuk dan dijadikan landasan pengembangan kurikulum, persepsi konsensusnya adalah keseragaman umum tapi pada tataran teknisnya tidak mengalami dekonsensus dengan ketakutan agar tidak terjadi miskonsepsi. Pemahaman perguruan tinggi dalam menciptakan kurikulum masih sangat strukturalis dan bukan berupaya keluar dari belenggu struktur yang menjemukan.

5. Kultur vs Sub-Kultur

Pendidikan di Indonesia masih berada dalam kultur homogen, terstruktur, khawatir perbedaan, dan tidak mampu menciptakan standar sendiri karena sentralistisnya regulasi yang berdampak *reward* dan *punishment*. Sederhananya, sistem politik yang dianut mempengaruhi kebijakan pendidikan, dengan berbentuk republik maka pendidikanpun berupaya dikelola secara sentralistis walaupun dengan dalih telah disarikan dari perbedaan dan keragaman tetap saja tidak komprehensif menyerap kearifan lokal. Berbeda dengan Amerika dengan bentuk negara federal, tiap distrik atau negara bagian memiliki otonomi dalam kebijakan kurikulumnya (Tilaar, 2012:133).

Homegenisasi kultur ini dominan berada pada proses pembelajaran, meskipun menawarkan berbagai macam strategi pembelajaran tetap saja ada standarisasi beban waktu belajar dalam satuan sks berdurasi 60-60-50. Kultur ini menciptakan reduksi psikologis yang cukup kuat baik di dosen maupun mahasiswa, dikontrol pula dengan seperangkat regulasi kampus apapun kondisi dan lingkungan belajar mereka. Gagasan sks itu sangat konvensional dan mengabaikan peran aktor belajar. Sistem sosial dianggap memiliki pengaruh perilaku individu karena ditentukan kekuatan eksternal yang berskala luas (Blumer, 1969:83), padahal sistem yang diciptakan harus mengakomodir semua karakteristik, keadaan, dan

kearifan lokal. Dan yang lebih penting, strategi belajar yang dicantumkan pada SN-Dikti tidaklah terpatok dengan waktu atau durasi belajar, melainkan waktulah yang harusnya menyesuaikan dengan strategi belajar untuk mencapai luaran yang diharapkan. Dan sekarang jika aktor dalam hal ini dosen mencoba menjadi sub-kultur, artinya dia harus berhadapan dengan seperangkat regulasi dengan berbagai hukuman bagi pelanggarnya.

PENUTUP

Kritik terhadap artinya kurikulum memiliki dampak struktural terhadap sistem, yakni mengkritisi keseluruhan sistem, dengan pemangku kepentingannya. Studi kritis atas kurikulum pendidikan tinggi Indonesia ini sangat multipersepsi karena berdiri pada azas – azas modernitas yang menjunjung tinggi etika lingkungan dan perbedaan. Harapan kritik adalah terciptanya kemajuan dan menghilangkan *false consciousness* atau kesadaran palsu yang tidak berujung, walaupun kritik posmodernisme juga hakikatnya tidak berujung.

DAFTAR PUSTAKA

- Blumer, H (1969). *Attitudes and The Social Act*. Englewood Cliffs : Prentice-Hall
- Dean, M (1994). *Critical and Effective Histories: Foucault's Method and History of Sociology*. Routledge : London

- Freire, P (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. The Seanburry Press : New York
- Foucault, M (1965). *Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason*. Vintage : New York
- Illich, I (1971). *Deschooling Society*. McMillan Publishing : New York
- Nietzsche, F (2002). *Beyond God and Evil*. Oxford University Press : New York
- Slattery, P (2006). *Curriculum in the Postmodern Era*. Cambridge Press : Cambridge
- Schubert, W (1986). *Curriculum: Perspective, Paradigm, and Possibility*. McMillan Publishing : New York
- Tilaar, H.A.R (2012). *Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Toffler, A. (1971). *Pergeseran Kekuasaan*. Rajawali Press: Jakarta
- *Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. MENKUMHAM RI : Jakarta
- *Pedoman Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2016*. Direktorat Pembelajaran & Kemahasiswaan. KEMENRISTEKDIKTI RI : Jakarta

----- *Undang-Undang*
Nomor 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.
KEMENKUMHAM RI :
Jakarta

----- *Undang-Undang*
Nomor 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi.
KEMENKUMHAM RI :
Jakarta